

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA BAGI  
HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA BANTUAN SOSIAL  
DI KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

**Indah Permata Sari**

**01021381419160**

**Ekonomi Pembangunan**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**  
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA BAGI**  
**HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA BANTUAN SOSIAL DI KOTA**  
**PALEMBANG**


Disusun Oleh :

Nama : Indah Permata Sari  
NIM : 01021381419160  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah


**TANGGAL PERSETUJUAN**

**DOSEN PEMBIMBING**

Tanggal : 09 Maret 2018

  
Ketua : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015

Tanggal : 03 Maret 2018

  
Anggota : Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA BAGI**  
**HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA BANTUAN SOSIAL DI KOTA**  
**PALEMBANG**

Disusun Oleh :

Nama : Indah Permata Sari  
NIM : 01021381419160  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah di uji dalam ujian Komprehensif pada tanggal 20 Maret 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 20 Maret 2018

Ketua



Dr. Anna Yulianita, M.Si.  
NIP. 197007162008012015

Anggota



Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001

Anggota



Imelda, S.E., M.S.E  
NIP. 197703092009122002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Suhel, M.Si.  
NIP. 196610141992031003

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Permata Sari  
NIM : 01021381419160  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:  
“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap  
Belanja Bantuan Sosial di Kota Palembang”.

Pembimbing :  
Ketua : Dr. Anna Yulianita ,SE.,M.Si.  
Anggota : Mukhlis, S.E., M.Si  
Tanggal diuji : 20 Maret 2018

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikialah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 21 Maret 2018

Pembuat Pernyataan



Indah Permata Sari  
Nim.01021381419160

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

	<b>Nama</b>	: Indah Permata Sari
	<b>NIM</b>	: 01021381419160
	<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	: Palembang, 17 Desember 1996
	<b>Alamat</b>	: Jl. PDAM Lrg. Mandi Api No. 31 RT. 69 RW. 03, Kelurahan Bukit Lama, Palembang
	<b>Handphone</b>	: 082371000869
<b>Agama</b>	: Islam	
<b>Jenis Kelamin</b>	: Perempuan	
<b>Status</b>	: Belum Menikah	
<b>Kewarganegaraan</b>	: Indonesia	
<b>Tinggi</b>	: 156 cm	
<b>Berat Badan</b>	: 42 kg	
<b>Kegemaran</b>	: Traveling	
<b>Email</b>	: <a href="mailto:ips.indahpermatasari@rocketmail.com">ips.indahpermatasari@rocketmail.com</a>	
<b>PENDIDIKAN</b>		
<b>2001-2002</b>	: TK Dharma Wanita PDAM Tirta Musi Palembang	
<b>2002-2008</b>	: SD Negeri 11 Palembang	
<b>2008-2011</b>	: SMP Negeri 18 Palembang	
<b>2011-2014</b>	: SMA Srijaya Negara Palembang	
<b>2014-2018</b>	: Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya	
<b>PENGALAMAN ORGANISASI</b>		
<b>2014-2016</b>	: Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan (HMJ-EP) Kampus Palembang	
<b>2016-2017</b>	: Anggota Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (IMEPA)	

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Bantuan Sosial di Kota Palembang”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan dengan keterbatasan saya, baik dalam kemampuan maupun pengetahuan serta pengalaman yang saya miliki. Besar harapan saya agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Palembang, 21 Maret 2018



Indah Permata Sari

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Bantuan Sosial di Kota Palembang”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas rahmat dan karunia-Nya serta Rasul-Nya baginda Muhammad salallahu alaihi washalatu wasalam.
2. Kedua Orangtuaku, yang telah mendoakan, memberi support materil dan immaterial.
3. Dosen Pembimbing Dr. Anna Yulianita S.E., M.Si dan Mukhlis, S.E., M.Si yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Penguji Imelda, S.E., M.S.E yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
5. Ketua dan Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Dr. Suhel M.Si dan Dr. Imam Asngari SE., M.Si.
6. Serta Saudara dan teman-teman yang selalu yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

## ABSTRAK

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Bantuan Sosial di Kota Palembang**

Oleh:

**Indah Permata Sari; Anna Yulianita; Mukhlis**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Bantuan Sosial di Kota Palembang dengan menggunakan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data “time series” dari tahun 2007-2016.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial (3) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 78,30 persen dan sisanya dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini, yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial cukup kuat.

*Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil, Belanja Bantuan Sosial*

Ketua



Dr. Anna Yulianita, M.Si.  
NIP. 197007162008012015

Anggota



Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Suhel, M.Si.  
NIP.19661014199203100



## ABSTRACT

### THE EFFECT OF THE LOCALLY-GENERATED REVENUE AND REVENUE-SHARING FUNDS TO SOCIAL ASSISTANCE SPENDING IN PALEMBANG CITY

By:

**Indah Permata Sari; Anna Yulianita; Mukhlis**

*This study aims to determine the extent of influence locally-generated revenue and revenue-sharing funds to social assistance spending in Palembang city with used secondary data. the analysis technique used is multiple linear regression model with the amount of "time series" from year 2007-2016.*

*The results of the study stated that (1) Locally-Generated Revenue and Revenue-Sharing Funds are equally take efect and significant to Social Assistance Expenditures (2) locally-generated revenue have a negative and significant impact on social assistance spending (3) revenue sharing funds has a positive and significant impact on social assistance spending. The value of the coefficient of determination ( $R^2$ ) is 78,30 percent and the rest is influenced by other variables outside this study, which means that the independent variables affect the assistance expenditure social is strong enough.*

*Keywords: Locally-Generated Revenue, Revenue-Sharing Funds, Assistance Expenditure Social.*

First Advisor



Dr. Anna Yulianita, M.Si.  
NIP. 197007162008012015

Member



Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Inggris) .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II STUDI PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Peacock dan Wiseman.....	9
2.1.2 Belanja Daerah .....	11
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial .....	13
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
2.1.5 Dana Bagi Hasil (DBH) .....	17
2.1.5.1 Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) .....	17
2.1.5.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA) .....	18
2.2 Penelitian Terdahulu .....	20
2.3 Kerangka Pikir .....	25
2.4 Hipotesis.....	27

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	28
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.3 Teknik Analisis .....	29
3.3.1 Uji Gauss Markov .....	29
3.3.2 Uji Statistik.....	32
3.3.2.1 Uji Hipotesis .....	32
3.4 Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel.....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Objek Penelitian .....	36
4.1.1 Gambaran Geografis Kota Palembang.....	36
4.1.2 Kondisi Demografis .....	38
4.1.3 Kondisi Keuangan Daerah Kota Palembang.....	39
4.2 Hasil Penelitian .....	43
4.2.1 Deskriptif Kuantitatif .....	43
4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda .....	45
4.2.3 Uji Gauss Markov .....	46
4.2.4 Uji Statistik .....	51
4.3 Pembahasan.....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran.....	57
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>58</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persentase Pembagian DBHP .....	18
Tabel 2.2 Persentase Pembagian DBHSDA .....	20
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Palembang .....	38
Tabel 4.2 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2007-2016.....	39
Tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2016.....	41
Tabel 4.4 Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2007-2016.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Deskriptif Kuantitatif.....	43
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	45
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas .....	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi .....	49
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas .....	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	52
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	53

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Trend Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Bantuan Sosial di Kota Palembang Tahun 2007-2016.....	6
Gambar 2.1 Kurva Teori Peacock dan Wiseman .....	10
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas .....	47
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Belanja Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2007-2016 .....	63
Lampiran 2 Uji Deskriptif Kuantitatif.....	64
Uji Regresi Linier Berganda .....	64
Uji Normalitas .....	65
Uji Autokorelasi .....	66
Uji Heteroskedastisitas .....	66
Uji Multikolonieritas.....	67
Uji Koefisien Determinasi .....	67
Uji F .....	68
Uji t .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 dan UU 32/2004 melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat *draft/rancangan* APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim dan Kusufi, 2012:21). Salah satu yang menjadi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud yaitu berupa belanja daerah. Belanja daerah merupakan salah satu komponen terpenting dari APBD yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan umum dalam berbagai sektor di daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil relatif dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dengan kata lain belanja daerah dapat dikatakan sebagai belanja yang dikeluarkan oleh daerah yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang akan mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Belanja daerah memiliki berbagai komponen yaitu: a) Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes, belanja tidak terduga. b) Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Belanja bantuan sosial adalah salah satu komponen belanja daerah yang secara tidak langsung dan merupakan pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah berupa uang dan barang/jasa yang ditunjukkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi terjadinya resiko sosial, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penerima bantuan sosial terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat



memenuhi kebutuhan hidup minimum sesuai dengan UU RI Pasal 4 ayat 1 No. 81 Tahun 2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga.

Bentuk pembayaran bantuan sosial dialokasikan ke dalam APBD/APBN antara lain: Belanja bantuan sosial dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial disalurkan melalui transfer uang, transfer barang/jasa dari pemerintah kepada lembaga-lembaga terkait untuk membantu mengurangi beban masyarakat. Di Kota Palembang belanja bantuan sosial dapat berupa bantuan pendidikan, keagamaan, kesehatan, perekonomian dan bidang lain berperan untuk melindungi individu.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang No.69 tahun 2013, Bantuan sosial diberikan berupa: 1) Uang dan barang/jasa yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial dan lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, perekonomian dan lembaga lain. 2) Non tunai diberikan secara langsung kepada masyarakat yang tergolong dalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Rumah Tangga Sederhana (RTS) berupa penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kontribusi terbesar yang Belanja daerah dan komponen-komponennya yaitu adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diteruskan dengan dana perimbangan hal ini sesuai dengan APBD, bahwa pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pendapatan sendiri dapat

dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah (Pendapatan Asli Daerah - selanjutnya disingkat dengan PAD) dan transfer dari pusat yang disebut Dana Perimbangan (terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus). (Kurniawati, 2010).

Berdasarkan Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002:46). Dana perimbangan memiliki berbagai komponen yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Salah satu komponen dana perimbangan yang mempengaruhi belanja daerah dan komponennya yaitu berupa Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain

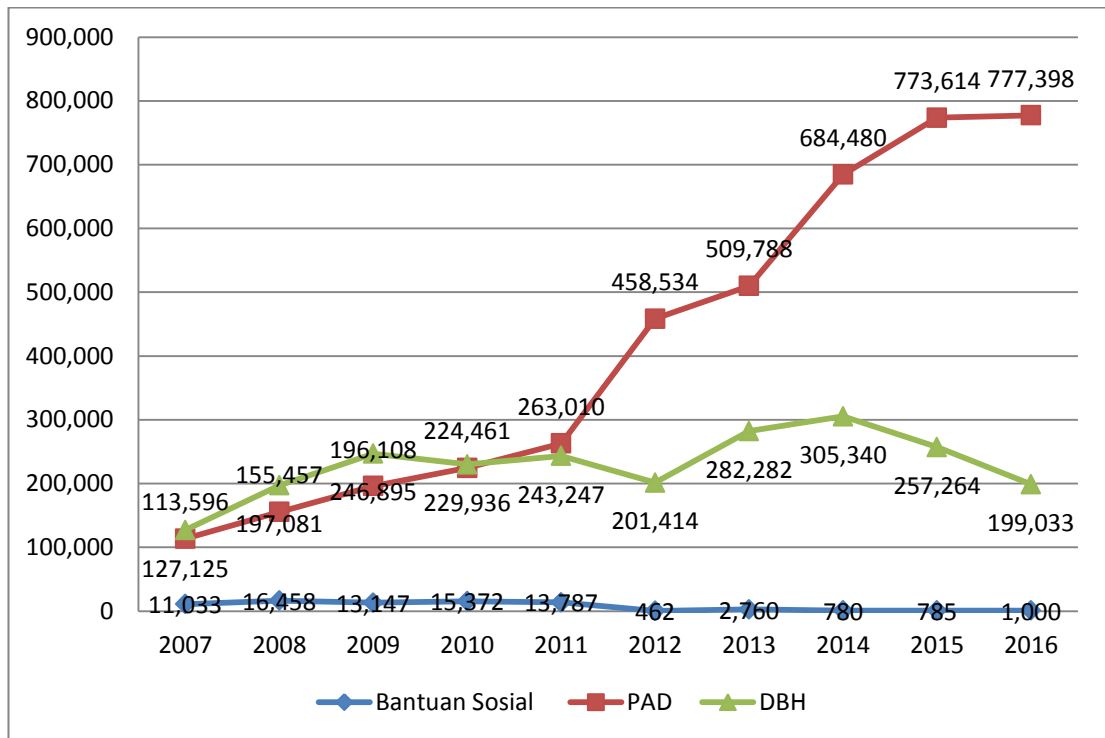
DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (Wandira, 2013).

Perubahan DBH sangat penting karena merupakan dana yang bebas digunakan oleh pemerintah daerah. Artinya, jika ada perubahan (penambahan) alokasi DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka perubahan penerimaan tersebut tidak terikat untuk membiayai kegiatan atau program tertentu. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan sendiri untuk apa dana tersebut dibelanjakan (Abdullah dan Ronna, 2015).

Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Daerah yang memiliki kekayaan alam dan penghasilan pajak akan memiliki penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya (Nazarullah, 2011).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Wahyuni dan Adi, 2009).

Berikut ini adalah perkembangan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Sosial di Kota Palembang pada tahun 2007-2016:



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI (Juta rupiah).

**Gambar 1.1 Trend Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Bantuan Sosial Di Kota Palembang Tahun 2007-2016**

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa pendapatan pemerintah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini terlihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2007 sebesar Rp.113,596 miliar dan meningkat hingga tahun 2016 sebesar Rp.777,398 miliar. Berbeda dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini terlihat dari jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2007 sebesar Rp.127,125 miliar dan pada tahun 2016 sebesar Rp.199,033 miliar.

Pengeluaran pemerintah di bidang belanja bantuan sosial setiap tahunnya mengalami fluktuasi, hal ini terlihat dari pengeluaran pemerintah di bidang bantuan belanja sosial dari yang tertinggi yaitu sebesar Rp.16,458 miliar pada

tahun 2008 dan mengalami penurunan hingga belanja bantuan sosial sebesar Rp.1,000 miliar pada tahun 2016.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprianto (2014) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi anggaran sosial. Hasil ini mengindikasikan bahwa semua unit atau organisasi atau SKPD yang harus lebih memfokuskan atau mengutamakan anggaran sosial, karena hal ini sangat penting untuk dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia dan pemerintah harus mementingkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2007) menunjukkan bahwa ketika transfer DBH diprediksi mengalami penurunan, pemerintah daerah berupaya menaikkan PAD sebagai sumber dana pengganti bagi pembiayaan aktivitas belanja pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Amran, Darwanis dan Abdullah (2015) menunjukkan hasil yaitu, berupa perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap perubahan belanja bantuan sosial.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja bantuan sosial di Kota Palembang?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja bantuan sosial di Kota Palembang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai penerapan ilmu yang dimiliki serta menambah wawasan dan pengetahuan agar dapat mengaplikasikan semua ilmu yang telah didapat selama ini yang berhubungan dengan keuangan daerah, khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan belanja bantuan sosial. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan kajian dan sebagai pembanding serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dan memberikan masukan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S dan Ronna, R. 2015. *Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal: Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia*. Makalah dipresentasikan pada konferensi Regional Akuntansi II IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan Malang, 29-30 April.
- Aditiya, N.Y dan Dirgantari, N. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota (Studi Kasus Daerah Jawa Tengah Tahun 2013-2015)*. Universitas Muhammadiyah, Purwokerto.
- Amran; Darwanis; dan Abdullah, S. 2015. *Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh)*. Jurnal Magister Akuntansi. Universitas Syiah Kuala. Vol 4, No. 1, Banda Aceh.
- Apriliawati, K.N dan Handayani, N. 2016. *Pengaruh PAD Dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota (Studi Kasus Daerah Jawa Timur)*. STIESIA, Surabaya.
- BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan. 2017. *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. <http://palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PAD-PARIwisata-.pdf>
- BPS Kota Palembang/Statistics of Palembang Municipality. 2017. *Kota Palembang Dalam Angka: Palembang Municipality in Figures*. Palembang: CV. Alief Media Grafika.
- Darwanto dan Yustikasari, Y (2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.
- Dokumen Kementerian Keuangan RI. *Data Keuangan Daerah Setelah TA 2006*. [http://www.djpk.depkeu.go.id/?page\\_id=316](http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316)
- Dokumen Kementerian Keuangan RI. *Persentase Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) 2016*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/dbh-pajak.pdf>  
<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/dbh-sda.pdf>

- Durohman, Awid. 2016. *Pencapaian PAD Pajak Palembang 2016 Lampau Target*. Suara Nusantara (Koran), 22 Desember 2016, <http://koransn.com/pencapaian-pad-pajak-palembang-2016-lampau-target/>
- Ernayani, Rihfenti. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Balikpapan. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Vol. 1 No.1.
- Fauzi, Teuku. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah di Aceh*. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Ghozali, Imam. 2001, *Aplikasi Analisis Multivariance dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2001. *Ekonometrik Dasar*. Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Ekonometrik Dasar*. Erlangga, Jakarta
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hasan, M. Iqbal. 2001. *Pokok-pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 1, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kurniawati, Fransisca Roosiana. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Mare, Surakarta.
- Latif, M; Wijaya, A.F; dan Domai, T. 2014. *Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Universitas Brawijaya, Yogyakarta.



- Lohonauman, Indriani Luisa. 2016. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Daerah Kabupaten Sitaro)*. USR. Jurnal EMBA Vol.4 No.1.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1994, *Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia: Substansi dan Urgensi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mankiw, N. Georgy. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta
- Maryati, U dan Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, vol 5, No. 2.
- Masdjoko, G.N dan Sukartono. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota (Studi Kasus Daerah Jawa Tengah Tahun 2006–2008)*. Universitas Stikubank. TEMA Vol 6 Edisi 1.
- Muttaqin, Zainal. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Bandung.
- Nazarullah, 2011. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Migas dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Utara*. Skripsi. Aceh Utara. Aceh Utara.
- Noordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pasal 99 No. 45 tahun 2013. *Tentang Belanja Bantuan Sosial*.
- Peraturan Walikota Palembang No.69 tahun 2012. *Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*.
- Permendagri No. 13 tahun 2006. *Tentang Belanja Daerah*.

- Permenkeu RI No. 81/Pmk.05/2012. *Tujuan Penggunaan Anggaran Bantuan Sosial*.
- Permenkeu RI No. 101 /PMK.02/2006. *Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006*.
- Putra, I.B.D dan Dwirandra, A.A.N.B. 2015. *Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali*. Universitas Udayana. Jurnal Akuntansi. Vol.13. 2015: 811-827, Bali.
- Pratisto, Arif. 2014. *Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 12*. Gramedia, Jakarta.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Rahmawati, L. A dan Suryono, B. 2015. *Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah*. STIESIA. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 4 No. 9 (2015), Surabaya.
- Santoso, Singgih. 2002. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sari, Erlina Tiara Intan. 2017. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)*. STIESIA. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6. Surabaya.
- Sari, N.P dan Idhar, Y. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Satyaka, Putut Hari. 2017. *Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam*. Direktorat Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Diakses melalui <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/06/Buku-Pegangan-Perhitungan-Alokasi-DBH-SDA.pdf>
- Shafi'I, Mochamad Syukron. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana 16 Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi Universitas uria

- Sitanggang, B; Tangdililing, A.B; dan Maryuni, S. 2014. *Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya*. UTP, Pontianak.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Suprianto, Edy. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Semarang Terhadap Belanja Bantuan Sosial (Studi Kasus Daerah Kota Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang.
- Syahputra, Indra. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ilmu Sosial.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang RI Pasal 4 ayat 1 No. 81 Tahun 2012 *Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga*.
- Wahyuni dan Adi, H.P. 2009. *Analysis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah*. Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Surabaya.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Artikel online melalui <http://lib.unnes.ac.id>
- Widjaja, HAW, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.